

# Ekspresi Ujaran Kebencian Daring dalam Bahasa Lokal di Indonesia

## Ekspresi Ujaran Kebencian Daring dalam Bahasa Lokal di Indonesia

Penulis : Engelbertus Wendratama  
Masduki  
Rahayu  
Putri Laksmi Nurul Suci

Perancang sampul dan tata letak : gores.pena

Diterbitkan oleh:

### **Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)**

Jl. Lemponsari Raya, Gg. Masjid RT 9/RW 37 No 88B

Jongkang Baru, Sariharjo, Sleman, DIY, 55581

Email : kontak.pr2media@gmail.com / office@pr2media.or.id

Riset dan publikasi ini didukung oleh Internews Network.

Rekomendasi pengutipan:

Wendratama, E., Masduki., Rahayu., & Suci, P. L. (2023). Ekspresi Ujaran Kebencian Daring dalam Bahasa Lokal di Indonesia. Yogyakarta: PR2Media.

Publikasi ini tersedia dalam lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.

Anda bebas menyalin, mendistribusikan, dan membuat karya turunan dari publikasi ini, asalkan Anda:

- 1) memberikan kredit untuk PR2Media
- 2) tidak menggunakan karya ini untuk tujuan komersial
- 3) mendistribusikan karya apa pun yang berasal dari publikasi ini di bawah lisensi yang identik dengan lisensi ini.

Untuk mengakses teks hukum lengkap dari lisensi ini, silakan kunjungi:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode>

Seluruh isi dokumen ini menjadi tanggung jawab penuh PR2Media.

# DAFTAR ISI

---

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>2</b>
<b>Tujuan</b> .....	<b>7</b>
<b>Metode dan Aktivitas</b> .....	<b>8</b>
<b>Temuan</b> .....	<b>10</b>
<b>Penutup</b> .....	<b>44</b>
<b>Referensi</b> .....	<b>47</b>
<b>Lampiran</b> .....	<b>53</b>



## Kata Pengantar

Kehadiran media sosial yang dikelola oleh platform digital berskala global di Indonesia telah mendapat perhatian berbagai pihak: pemerintah, regulator media, akademisi, aktivis sosial, dan masyarakat luas. Perhatian tidak hanya tertuju pada bagaimana tata kelola platform digital selaku pemilik dan pengelola media sosial, tetapi juga pada dampak percakapan digital terhadap dinamika sosial dan politik di Indonesia. Berbeda dengan negara-negara di Eropa atau Asia lainnya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik demografi yang lebih kompleks, terdapat ratusan kelompok etnik atau suku bangsa, dengan ragam bahasa dan budaya percakapan yang tinggi. Media sosial memindahkan ragam percakapan dan budaya komunikasi, dari *offline* ke *online*, dari lokal menjadi global, disertai budaya kebebasan berekspresi yang besar.

Riset ini bertujuan merespons fenomena tersebut, dengan kesadaran bahwa bahasa menjadi alat strategis untuk menciptakan kerukunan sosial, apalagi menjelang Pemilu 2024. Riset ini menjadi bagian dari mitigasi budaya komunikasi dan percakapan digital yang semarak, yang berdampak buruk: memicu aksi ujaran kebencian, dis-/misinformasi dan manipulasi informasi, menggerus harmoni sosial dan merugikan bahasa lokal merugikan kualitas bahasa lokal. Mencermati situasi ini, PR2Media menyadari arti strategis moderasi konten oleh platform digital, dan untuk itu proses tersebut harus berbekal ekspresi-ekspresi dalam bahasa lokal, sebagai alat verifikasi bagi pengelola platform digital.

PR2Media telah melakukan pengumpulan dan analisis diksi-diksi yang berpotensi memicu konflik sosial, mengandung ujaran kebencian berbasis etnik dan agama dalam bahasa lokal dan daerah. Kami memilih tiga provinsi sebagai *pilot project*: Jawa Barat sebagai

pusat dialek Sunda, Kalimantan Tengah dengan bahasa Banjar dan Dayak, dan Papua dengan bahasa lokal Papua. Hasil penelitian ini kami sampaikan kepada pengelola platform media sosial dengan harapan bisa dimanfaatkan dalam proses moderasi konten dan kepada pemerintah dalam konteks pengaturan konten digital.

Publikasi hasil riset ini merupakan bagian dari sosialisasi publik dan advokasi kebijakan moderasi konten di Indonesia. Di masa depan, kami berharap riset ini berlanjut ke seluruh provinsi dan etnik di Indonesia. Atas terselenggaranya riset ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak sebagai berikut: Zoey Tung Bathelemy dari Internews Network selaku mitra pendukung utama melalui skema program Internews' Platform Impacts Fund, para narasumber FGD, peneliti mitra di tiga provinsi, dan tim penelitian PR2Media. Selamat membaca.

Yogyakarta, 18 Oktober 2023,

**Masduki**

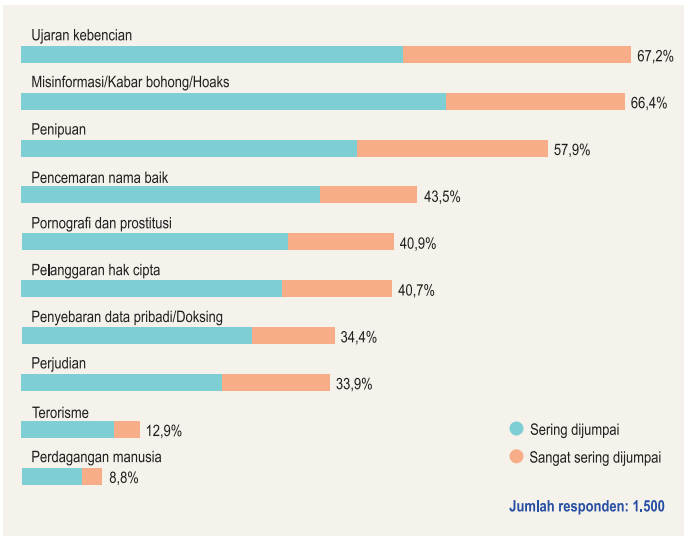
Ketua PR2Media

# **EKSPRESI UJARAN KEBENCIAN DARING**

# Pendahuluan

Sebagai negara dengan ratusan bahasa daerah yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau, terdapat 167 juta pengguna media sosial Indonesia per Januari 2023 (Kemp, 2023). Dengan beragam bahasa dan dialek yang ada, platform media sosial mengalami tantangan besar dalam memoderasi konten ilegal dan berbahaya dalam bahasa-bahasa daerah tersebut.

Moderasi konten adalah aktivitas platform media sosial dalam menilai, menandai, membatasi akses, menurunkan popularitas, dan/atau menghapus konten ilegal dan berbahaya atau akun yang mengunggah konten tersebut untuk melindungi penggunanya. Dalam melakukan penilaian atas konten, platform media sosial memanfaatkan moderator manusia dan/atau kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*).



**Gambar 1.** Jenis Konten Ilegal yang Paling Sering Dijumpai Pengguna Media Sosial di Indonesia



Survei terhadap 1.500 pengguna media media sosial dari 38 provinsi di Indonesia yang dilakukan PR2Media dalam riset *Pengaturan Konten Ilegal dan Berbahaya di Media Sosial* (Wendratama, et al., 2023) menunjukkan, jenis konten ilegal yang paling sering dijumpai oleh responden adalah ujaran kebencian, seperti tampak dalam Gambar 1.

Persepsi responden dalam survei PR2Media di atas bisa dihubungkan dengan kenyataan bahwa, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ujaran kebencian merupakan bentuk konten ilegal yang sangat luas spektrumnya, sehingga berbeda dari definisi lebih sempit yang biasa dipakai oleh platform media sosial dan lembaga internasional.

Di Indonesia, menurut Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015, yang menjadi pedoman penegak hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian, “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk:

- penghinaan;
- pencemaran nama baik;
- penistaan;
- perbuatan tidak menyenangkan;
- memprovokasi;
- menghasut;
- penyebaran berita bohong;
- dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial”.

Dengan cakupan jenis konten yang sangat luas itu, dan diikuti beragam kasus hukum yang dialami warga Indonesia, tidak mengherankan jika persepsi pengguna media sosial menunjukkan

ujaran kebencian sebagai jenis konten ilegal yang paling sering mereka jumpai di media sosial.

Meski demikian, riset pemetaan ekspresi ujaran kebencian ini mengacu pada definisi yang umum dipakai secara internasional, yaitu “serangan verbal terhadap karakteristik inheren seseorang atau kelompoknya” seperti etnik, agama, kebangsaan, dan gender.

(Gagliardone et al., 2015)

Sebagai contoh, the UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “segala bentuk komunikasi secara lisan, tertulis, atau perilaku yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif terhadap seseorang atau suatu kelompok berdasarkan siapa mereka, dengan kata lain, berdasarkan agama, suku, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin atau faktor identitas lainnya” (United Nations, n.d.).

Sementara itu, platform media sosial juga menggunakan definisi yang tidak jauh berbeda dari kebijakan PBB tersebut.

YouTube mendefinisikan konten ujaran kebencian sebagai “konten yang mempromosikan kekerasan atau kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan salah satu atribut berikut, yang merupakan status kelompok yang dilindungi berdasarkan kebijakan YouTube:

- Usia
- Kasta
- Disabilitas
- Etnis

- Identitas dan Ekspresi Gender
- Kebangsaan
- Ras
- Status imigrasi
- Agama
- Jenis Kelamin/Gender
- Orientasi Seksual
- Korban peristiwa kekerasan besar dan keluarga mereka
- Status veteran” (YouTube, n.d.).

Tidak jauh berbeda, Facebook mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “sebuah serangan langsung terhadap orang – bukan terhadap konsep atau institusi – berdasarkan apa yang kami sebut sebagai karakteristik yang dilindungi: ras, etnik, asal negara, disabilitas, afiliasi keagamaan, kasta, orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, dan penyakit serius” (Facebook, n.a.).

Banyak riset sudah dilakukan untuk memahami ujaran kebencian di media sosial, sebuah permasalahan yang dijumpai oleh beragam kelompok demografi di banyak negara (Hawdon et al., 2017, Reichelmann et al., 2021, Schafer, et al., 2023). Riset-riset itu menyebutkan, konflik ujaran kebencian antar individu atau kelompok warga di media sosial, terutama yang berbasis etnik dan agama, bisa memicu konflik yang lebih luas di tengah masyarakat (Sazali, et al, 2022), sebagaimana sejarah mencatat betapa sentimen etnik, ras, dan agama bisa sangat kuat membangkitkan serangan fisik terhadap kelompok etnik, ras, dan agama tertentu (Piazza, 2020).

Di Indonesia, terdapat berbagai riset yang meneliti ujaran kebencian di media sosial. Misalnya, tentang ujaran kebencian yang biasa hadir bersamaan dengan disinformasi/misinformasi terutama pada masa kontestasi politik, seperti pada Pemilu 2014 dan 2019

maupun pada masa pandemi Covid-19 (Kurnia et al., 2020, Mujani & Kuipers, 2020, Wendratama & Yusuf, 2023).

Sementara itu, riset yang berfokus pada jenis ungkapan yang dipakai dalam menyampaikan ujaran kebencian di Indonesia dilakukan oleh Bako, et al. (2019) dan Darmawan & Muhaimi (2019). Dua riset ini menganalisis penggunaan disfemisme (*dysphemism*) oleh pengguna media sosial dalam menyampaikan ujaran kebencian. Disfemia adalah penggunaan kata atau frasa untuk memperkasar makna dari satuan leksikal agar terkesan negatif oleh pembaca dan pendengar (Chaer, 2007 dalam Bako, et al, 2019). Disfemia merupakan lawan dari eufemisme karena mengganti ekspresi yang bersifat netral atau eufemistik dengan ekspresi yang bersifat ofensif (Darmawan & Muhaimi, 2019).

Lebih lanjut, Darmawan & Muhaimi (2019) merinci sembilan jenis disfemisme yang dikenali oleh para ahli bahasa. (1) Sinekdoke; digunakan untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang secara keseluruhan (2) Julukan disfemistik; penggunaan nama binatang. (3) Disfemisme eufemistik; membuat serangan tampak seperti pujian dengan menghindari penggunaan kata kasar. (4) Eufemisme disfemistik; ejekan antar teman dekat atau anggota keluarga tanpa rasa permusuhan. (5) Disfemisme “-ist”; menyasar etnik atau suku tertentu. (6) Disfemisme homoseksual; digunakan untuk serangan terkait homoseksualitas. (7) Disfemisme nama; menyebut nama seseorang sesuai panggilan kasualnya, tanpa gelar yang pantas. (8) Disfemisme nonverbal; menyinggung seseorang dengan gerak tubuh. (9) Disfemisme lintas budaya; menggunakan istilah gaul yang memiliki arti tertentu di sebuah budaya, tapi memiliki arti di budaya lain. Riset itu menemukan, disfemisme “-ist” yang menyerang etnik tertentu sebagai jenis yang paling banyak muncul dalam konten media sosial yang mereka teliti (Darmawan & Muhaimi, 2019).

Dipandu oleh jenis-jenis disfemisme di atas, peneliti PR2Media mengidentifikasi kata atau frasa dalam bahasa lokal di tiga provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Papua, yang biasa dipakai oleh pengguna media sosial untuk menyampaikan ujaran kebencian berbasis etnik dan agama di daerah mereka. Tiga provinsi di atas dipilih sebagai perwakilan dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, sebagai upaya peneliti mendapatkan sampel dari tiga wilayah besar di Indonesia.

Dengan keberadaan bahasa daerah di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 600 bahasa daerah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), tiga provinsi itu jelas belum representatif untuk mewakili kebutuhan warga Indonesia yang sangat beragam. Bagaimanapun, peneliti menilai, riset ini bisa berperan sebagai pilot project untuk riset lanjutan yang lebih luas cakupannya sehingga kemampuan moderasi konten platform media sosial bisa lebih akurat dalam memenuhi kebutuhan warga Indonesia.

## Tujuan

1. Mengidentifikasi kata dan frasa dalam bahasa lokal yang biasa dipakai pengguna media sosial<sup>1</sup> di Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua, untuk mengungkapkan ujaran kebencian berbasis etnik dan agama?
2. Mengidentifikasi konteks penggunaan kata dan frasa dalam bahasa lokal tersebut

---

<sup>1</sup> Riset ini membatasi pada platform media sosial terbuka, yaitu YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan X (dulu Twitter) karena konten di dalam lima platform tersebut dimoderasi oleh penyelenggara media sosial dan kelimanya adalah platform dengan jumlah pengguna terbesar di Indonesia.

## Metode dan Aktivitas

Untuk mengetahui kajian yang pernah ada tentang ujaran kebencian dengan bahasa lokal, peneliti melakukan studi pustaka. Studi ini dilakukan dengan menelusuri jurnal-jurnal ilmiah dan laporan penelitian terdahulu yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan dengan memanfaatkan beberapa databases seperti scopus, ProQuest, JSTOR, dsb. Dalam studi pustaka, peneliti melakukan review terhadap studi-studi tentang ujaran kebencian dan penggunaan bahasa lokal. Dari hasil studi ini diketahui, meski banyak literatur telah membahas tentang ujaran kebencian, namun masih terbatas yang mengaitkannya dengan bahasa lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD). Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari suatu kelompok individu tentang pengalaman dan pengetahuan mereka berhadapan dengan ujaran kebencian dengan bahasa lokal. Individu yang menjadi peserta FGD dipilih secara sengaja dengan pertimbangan tertentu dan bukan sampel keterwakilan suatu populasi. Pertimbangan di sini utamanya adalah pengalaman atau keterlibatan mereka dalam ujaran kebencian tersebut. Peneliti memilih FGD dan bukan wawancara karena peneliti mengharapkan dalam diskusi terbatas tersebut peneliti tidak sekedar mendapatkan informasi pengalaman pribadi tapi juga memperoleh pandangan (validasi) dari grup terkait peristiwa yang dialami individu, termasuk ekspresi komunal dalam menyikapi ujaran kebencian berbahasa lokal (Boateng, W., 2012).

FGD dilakukan di tiga kota, yaitu Bandung (Ibu kota Provinsi Jawa Barat), Palangkaraya (Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah), dan Jayapura (Ibu kota Provinsi Papua). Alasan pemilihan ketiga wilayah ini adalah potensi kerentanan ujaran kebencian dan keterwakilan tiga wilayah Indonesia (Barat, Tengah, dan Timur).

FGD dilakukan dengan bantuan peneliti mitra PR2Media. Melalui peneliti mitra di ketiga wilayah tersebut, PR2Media berkoordinasi untuk menentukan peserta FGD. Adapun kriteria peserta FGD adalah individu yang memiliki pengalaman berhadapan dengan ujaran kebencian, mewakili etnik mayoritas yang ada di masing-masing daerah tersebut, tokoh masyarakat, edukator, peneliti, penggiat literasi digital, pengguna media sosial, termasuk mempertimbangkan keterwakilan gender dan usia. Melalui peneliti mitra, terkumpul 11-12 peserta FGD di setiap kota.

Sebelum FGD dimulai, peneliti meminta peserta untuk membuat daftar kata atau frasa bahasa lokal yang digunakan dalam ujaran kebencian. Berangkat dari daftar kata ini, peneliti mencari tahu konteks penggunaannya melalui FGD. Ada dua pertanyaan utama yang menjadi acuan diskusi: (1) apa kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa lokal/daerah yang biasa dipakai untuk mengungkapkan ujaran kebencian, terutama berbasis etnik dan agama? (2) Bagaimana konteks penggunaan kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa tersebut?. Proses FGD direkam dan ditranskrip secara verbatim dengan bantuan peneliti mitra untuk dapat lebih jelas dalam mendokumentasi ekspresi ujaran kebencian serta memberikan keterangan penerjemahan kata/frasa lokal ke bahasa Indonesia. Peneliti selanjutnya mengolah dan menganalisis data dengan membuat klasifikasi data berdasarkan dua topik utama, yaitu penggunaan bahasa lokal dalam ujaran kebencian dan konteksnya.

## Temuan

### FGD di Bandung, Jawa Barat

Waktu	: Kamis, 10 Agustus 2023
Pukul	: 09.00–12.00 WIB
Tempat	: Laboratorium Simulasi Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Jawa Barat
Fasilitator	: Rahayu dan Santi Indra Astuti
Peserta	: 11 peserta (daftar peserta terlampir)

Pelaksanaan FGD ditujukan untuk mendapatkan data mengenai berbagai kata dan frasa dalam bahasa Sunda (bahasa yang dituturkan oleh penduduk bersuku Sunda yang mayoritas ditemui di wilayah pulau Jawa bagian barat) yang lumrah digunakan oleh pengguna media sosial di wilayah Jawa Barat untuk menyampaikan ujaran kebencian berbasis etnik dan agama. Daftar kata dan frasa ini dikumpulkan berdasarkan pengalaman peserta FGD yang juga merupakan pengguna platform media sosial terbuka, seperti Facebook, Instagram, X (dulu Twitter), TikTok, dan YouTube.

FGD diikuti oleh 12 peserta dari berbagai macam profesi, seperti akademisi, jurnalis, aktivis bidang literasi digital, pihak minoritas etnik dan agama, serta mahasiswa yang merupakan pengguna aktif media sosial. Tidak seluruh peserta FGD merupakan orang asli Jawa Barat atau asli bersuku Sunda, tetapi juga terdapat orang pendatang yang baru menetap di wilayah Jawa Barat beberapa tahun.

Kegiatan FGD dipimpin oleh Rahayu, yang dimulai dengan pemaparan presentasi mengenai latar belakang dan tujuan riset. Selanjutnya, peserta FGD secara bergantian menceritakan pengalaman sekaligus menjelaskan kata dan frasa yang sudah mereka tuliskan di formulir tabel daftar ujaran kebencian yang telah dikirimkan terlebih dahulu oleh tim PR2Media. Forum diskusi



sangat terbuka bagi seluruh peserta FGD, sehingga dibebaskan untuk menanggapi, menyanggah, dan menambahkan pemaparan yang disampaikan oleh masing-masing peserta.

Jawa Barat pernah mendapatkan predikat sebagai wilayah dengan tingkat ujaran kebencian yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, dalam konteks menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Umum 2019 (Hardi, 2018). Temuan ini menjadi pertimbangan dalam memilih Jawa Barat dalam penelitian ini. Secara umum, ujaran kebencian yang menjadi diskusi FGD menunjukkan stereotip tentang etnik dan agama tertentu. Stereotype ini telah mengakar jauh di dalam kehidupan masyarakat Sunda, hingga menjadi 'kebiasaan' dan diterima oleh sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang normal dan bahkan masuk dalam bercandaan.

Meski demikian, kelompok target ujaran kebencian tidak selalu menganggapnya sebagai hal yang normal, terkadang mereka merasa tersinggung dan juga marah.

Catatan penting dari FGD, pertama, meski sebagian ujaran kebencian disampaikan dalam bahasa Sunda, namun ujaran kebencian umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Ujaran kebencian dalam bahasa Sunda umumnya digunakan dalam percakapan luring (tatap muka), sementara dalam konteks komunikasi termediasi, seperti melalui media sosial, bahasa Indonesia lebih dominan. Kedua, ujaran kebencian umumnya menysar pada etnik dan agama tertentu. Meski demikian, profesi atau pekerjaan tertentu juga menjadi target ujaran kebencian. Ketiga, terdapat konteks yang cukup bervariasi yang dapat menjadi pemicu munculnya ujaran kebencian.

Temuan FGD menunjukkan bahwa bahasa Sunda digunakan dalam ujaran kebencian terutama dalam percakapan luring. Meski ujaran kebencian berbahasa Sunda juga dijumpai di media sosial

(seperti X atau Twitter, Facebook, dan TikTok), peserta menyatakan jarang menjumpainya. Kebanyakan peserta justru menemukan ujaran kebencian di media sosial dalam bahasa Indonesia. Para peserta menganggap, ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia memiliki jangkauan distribusi yang luas dan menarget banyak warga dari berbagai etnik, karena mudah dimengerti. Sementara, jika ujaran kebencian menggunakan bahasa Sunda, hanya orang Sunda atau yang paham bahasa daerah ini yang dapat memahaminya.

Penggunaan bahasa Sunda dalam ujaran kebencian umumnya mengarah pada penghinaan terhadap etnik tertentu, tuduhan terhadap agama dan tradisi tertentu, dan diskriminasi terhadap gender.

Penghinaan terhadap etnik tertentu umumnya menarget warga Tionghoa. Beberapa ungkapan yang kerap muncul antara lain:

- “hey akew kamana”
- “amoy”
- “antek aseng”
- “Balik kalembur didinya, balik ka China siah rek naon didieu”  
(Pulang saja ke kampung halaman ke China, mau apa di sini)

Etnik lain yang juga sering menjadi target rasisme adalah Jawa, berikut beberapa ungkapan menghina yang ditujukan untuk orang Jawa:

- “Jawa koek Jawa koek jawa koek”
- “Jawir sama jamet jawir”
- “ngomong medok”
- “Rojali, Rombongan jawa lieur”

Meski demikian, tidak semua ungkapan itu secara sengaja dilontarkan untuk tujuan menghina, terkadang dalam pergaulan

ungkapan tersebut menjadi bagian dari bercandaan untuk tujuan keakraban. Di sinilah arti penting mempertimbangkan konteks penggunaan sebuah ungkapan (kata, frasa, atau kalimat).

Penghinaan juga menarget agama lain, terutama Kristen dan aliran tertentu dalam agama Islam. FGD menunjukkan, ujaran kebencian yang berkaitan dengan agama Kristen mengarah pada orang Sunda yang non-Muslim dan menjerus pada tuduhan gerakan kristenisasi terhadap umat Islam. Berikut beberapa ungkapan yang dihimpun melalui FGD:

- “eweuh sunda mah nu kristen teh” (tidak ada orang sunda yang Kristen)
- “sunda mah kabeh islam” (orang sunda semuanya Islam)”
- “ieu mah orang sunda nu dijual ku Indomie” (ini orang sunda yang dijual menggunakan Indomie, dinilai sebagai representasi Tionghoa yang Kristen).
- “Teteh eh kaka dibilang orang Kristen karena gapake kerudung”

Sementara, tuduhan terhadap tradisi tertentu di masyarakat mengarah pada klaim ajaran atau aliran sesat. Kasus yang pernah muncul berkaitan dengan festival Asyura di Geger Kalong yang dituduh sebagai aliran sesat. Berikut beberapa ungkapan yang pernah muncul di Twitter.

- “aliran sesat yang di Gerlong rada gelo cok”
- “anjir mun urang dikos digerlong eh bisa keneh miluan mereun nempokeun si aliran sesat” gitu ya”

Perbedaan aliran ajaran agama, seperti Syi’ah, juga menjadi sasaran ujaran kebencian. Komentar terkait Syi’ah di media sosial antara lain “ulah ngarerecok Bandungnya engke abdi, engke abdi tenggel sok bade”. (jangan membuat ribut di Bandung, nanti saya pukul, mau ga)”.

Ujaran kebencian juga menysar perempuan, termasuk perempuan Sunda, dengan melabeli mereka dengan atribut-atribut tertentu. Berikut beberapa contoh ujaran kebencian yang menysar perempuan:

- “perempuan sunda matre”
- “perempuan tau apa soal bola, perempuan diem aja, sana balik nyuci baju, cuci baju eee apa, balik masak aja ke dapur”

Fenomena etnik Tionghoa dan Jawa sebagai target ujaran kebencian oleh warga Jawa Barat tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalu Indonesia. Para peserta FGD menyatakan, perbedaan terhadap warga Tionghoa merupakan bagian dari politik penjajah Belanda yang dengan sengaja memecah belah bangsa Indonesia. Sentimen terhadap etnik tertentu sengaja dibangun untuk tujuan politik kolonialisme. Hingga kini, memori sejarah ini masih mengakar kuat di masyarakat Jawa Barat.

Etnik Tionghoa dapat dikatakan sebagai korban politik pecah belah (*divide et impera*) di masa pemerintahan Belanda. Pada masa itu, pemerintah Belanda memberlakukan klasifikasi rasial (1854) dan warga Tionghoa disebut sebagai bangsa “Timur Asing” (Basuki, 2020). Pelabelan ini menjadikan warga Tionghoa sebagai “orang luar” atau orang asing yang bukan termasuk dalam kategori bangsa Belanda ataupun bangsa Hindia Belanda (kelak menjadi Indonesia). Pelabelan identitas kebangsaan ini telah memunculkan sentimen terhadap warga Tionghoa yang dilihat sebagai orang asing. Konflik komunal antara warga non-Tionghoa dan Tionghoa terjadi terutama karena faktor ekonomi. Penduduk lokal berupaya memproteksi diri dari kegiatan perekonomian Cina yang mulai mendominasi. Konflik pun sering tersulut, selain karena persaingan kepentingan ekonomi, juga karena ada sentimen terhadap “orang luar” atau pendatang.

Sentimen negatif terhadap warga Tionghoa terus berlanjut ke masa Orde Baru. Politik identitas nasional yang digaungkan oleh pemerintah Orde Baru lebih condong pada identitas nasional yang berbasis pada etnisitas, yaitu identitas nasional yang dihasilkan dari nilai-nilai yang dibagi bersama lintas etnik dan kelompok masyarakat. Identitas nasional ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi siapa saja yang dapat disebut sebagai warga negara (Basuki, 2020). Dari sinilah muncul perdebatan tentang orang asli Indonesia dan bukan. Berdasarkan politik identitas ini, warga Tionghoa tidak dipandang sebagai orang asli Indonesia, meski mereka datang memasuki wilayah Indonesia pada masa kerajaan dan telah berasimilasi dengan warga dan budaya lokal. Posisi warga Tionghoa diperlemah karena tidak memiliki keterikatan wilayah seperti suku Sunda atau Jawa. Di samping itu, kecenderungan warga Tionghoa yang cenderung eksklusif (dengan ciri komunitas yang terdiri dari sesama warga Tionghoa) dan keberhasilan ekonomi mereka memicu kecemburuan kelompok masyarakat lain. Sentimen ini dinilai terus tinggal di dalam diri masyarakat Sunda, dan juga masyarakat lain di Indonesia, yang mendorong ujaran kebencian.

“Dari zaman dulu sampai sekarang tuh (warga Tionghoa) sasaran empuk ujaran kebencian. Waktu saya kecil ya di daerah Ciateul itu sekelilingnya banyak yang pribumi. Setiap saya lewat ada kata-kata “Hei Akew kamana”. [...] Orang Tionghoa sebagian juga merasa eksklusif karena memang dari zaman dulu Belanda mau pecah belah menjadi tiga strata, Eropa, Timur Jauh, dan pribumi. Sengaja diadu domba. Pada zaman Orde Baru, warga Tionghoa susah untuk jadi PNS, susah untuk jadi TNI, mau nggak mau ya dagang. Bahkan pada tahun 1950-an, sempat ada larangan, orang Tionghoa enggak boleh tinggal di kabupaten, harus

tinggal di kota. Hal-hal ini yang membuat kami menjadi berbeda, kami menjadi eksklusif,” kata Akiun, peserta FGD.

Dalam kaitannya dengan sentimen warga Sunda terhadap orang etnik Jawa, ini dianggap tidak dapat dilepaskan dari peristiwa sejarah tentang Perang Bubat yang melibatkan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Perang ini terjadi akibat gagalnya pernikahan antara Raja Majapahit dengan Putri Kerajaan Sunda. Perang Bubat ini telah membuat jarak antara Masyarakat Sunda dan Jawa serta memunculkan mitos larangan pernikahan antara orang Sunda dengan orang Jawa. Mitos ini kemudian menjadi realitas budaya yang diketahui dan dihidupi oleh masyarakat pendukungnya, dan masih dipercaya dalam konteks masyarakat modern seperti saat ini (Afnan, 2022). Peristiwa sejarah dan mitos ini pun menjadi diskusi dalam FGD, ketika peserta menelusuri akar persoalan munculnya ujaran kebencian terhadap etnik Jawa.

Dalam perkembangannya, bukan hanya dalam konteks pernikahan saja persoalan masyarakat Sunda dan Jawa muncul. Dalam keseharian, masyarakat Jawa menjadi target perundungan (*bullying*). Pengalaman menarik diutarakan oleh seorang warga yang merupakan orang Jawa (Tengah) dan kebetulan bekerja di wilayah Jawa Barat. Disampaikannya bahwa perundungan mulai terjadi saat ia mulai masuk kerja hingga saat ini. Meski pada awalnya merasa *shock* karena perundungan ini, lama kelamaan ia merasa biasa dan menganggapnya sebagai guyanan.

“Pada saat mulai bekerja saya saget. Ada kolega saya bilang, ‘Ngomong medok terus, ngga capek apa?’ Ternyata itu bercanda menurut mereka, tapi saya shock. Oke itu pengalaman lucu-lucuan tapi buat saya jadi heran dan berusaha memakluminya,” kata Ratna, peserta FGD.

Seorang peserta FGD, Risdo, bahkan menyatakan bahwa rasisme telah menjadi sesuatu yang “kasual” atau biasa bagi masyarakat Sunda.

Ada juga peristiwa olahraga yang berujung pada kisah perundungan dan ujaran kebencian. Pengalaman pahit ini dialami oleh ] seorang peserta FGD yang memberikan kritik terhadap tim sepakbola Persib yang terlalu cepat menyelenggarakan pertandingan, seolah-olah tidak terlalu peduli dengan pendukungnya yang meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Dalam perundungan tersebut, informan menyatakan bahwa dirinya yang kebetulan perempuan dan orang Malang (Jawa Timur) mendapatkan hujatan yang berlapis-lapis.

“Saya dihujat di media sosial, sumpah serapah. ‘Kamu perempuan tahu apa soal bola, perempuan diem aja, sana balik nyuci baju, balik masak aja ke dapur. Keselnya lagi ada selebtweet bola yang saya kenal dan dia tahu saya orang Malang. Dia balas, ‘Iyalah lu mah Arema’. Orang yang nggak follow saya tapi follow dia baca itu, kayak manggil supporter. Jadi walaupun saya bukan Aremania, saya kena ujaran kebencian. Identitas saya sebagai orang Jawa dan Malang dipakai semua untuk menghujat saya,” kata Ratna, peserta FGD.

Sementara itu, prasangka terhadap agama Kristen mengarah pada sikap bahwa perempuan yang tidak berhijab adalah orang Kristen dan menjadi objek perundungan. Salah satu contohnya, perundungan ini terjadi di lingkungan sekolah.

“Anak saya siswa kelas 4 di SD dan tidak pakai kerudung. Kenapa tidak pakai kerudung, agar dia kalau sudah besar

bisa memilih mau pakai kerudung atau tidak. Saya tidak mau memaksa. Dia nangis pulang sekolah. Dia dibilang orang Kristen karena tidak pakai kerudung. Di kelasnya memang cuma dua anak yang tidak pakai. Ketika saya ke sekolah, ada orang tua yang bisik-bisik, pantesan ibunya Cina. Kaget juga saya ketika bertemu dengan orang-orang tua. Disangkanya saya bukan warga mereka,” kata Citra, peserta FGD.

Hal di atas menandakan, sebagian masyarakat Sunda, baik disadari maupun tidak, telah membuat garis-garis pembatas bagi identitas mereka. Identitas ini kemudian bekerja dalam memilah warga, mana yang “*in group*” (kelompok mereka) dan mana yang “*out group*” (di luar mereka). Warga adalah “*in group*” jika dia Sunda, Islam, dan pendukung tim sepakbola Persib. Di luar itu berarti “*out group*”. Salah satu peserta FGD menyatakan bahwa identitas orang Sunda tidak dapat dilepaskan dari tiga hal, yaitu Islam, Persib, dan Siliwangi. Perbedaan identitas akan berpotensi untuk mengalami perundungan.

“Ada tiga ikon orang Sunda, yang pertama Islam, yang kedua Persib, yang ketiga Siliwangi. Identitas orang Sunda memuat tiga hal itu,” kata Gilang, peserta FGD.

Temuan FGD menunjukkan bahwa konteks SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) menjadi pemicu paling penting dalam ujaran kebencian. Salah seorang peserta menyatakan bahwa, “isu politik kalau sudah dikemas dengan bumbu-bumbu SARA, terutama etnik dan agama, pasti akan ribut”.

Kasus penistaan agama merupakan perihal serius bagi warga. Sebagian warga juga sulit menerima ajaran-ajaran agama yang



berbeda. Bahkan di media sosial tidak jarang dijumpai ungkapan “paehan weh” (bunuh saja) dan “darahnya halal” untuk menyerang kelompok-kelompok lain.

Ujaran kebencian juga gampang tersulut menyangkut isu Cina. Salah seorang peserta FGD yang kebetulan memiliki pimpinan orang Tionghoa, menyatakan bahwa bosnya tidak luput dari ujaran kebencian berbasis etnik. Jika ada bawahan yang mendapat peringatan dari pimpinan, tidak jarang si bawahan bersikap rasis dengan mengumpat, “Ah, dasar Chinese”.

Para peserta FGD juga menyatakan bahwa media sosial dianggap telah memediasi ujaran kebencian, terutama Twitter dan Facebook. Namun, salah satu peserta FGD juga menyatakan bahwa fitur di media sosial, seperti di Facebook, yang mengangkat kembali kenangan dahulu secara tidak sengaja ikut berperan menyulut kembali konflik di masyarakat. Fitur tersebut berpotensi membangkitkan kembali ingatan masyarakat akan suatu peristiwa tertentu yang tidak mengenakkan dan menyulut kembali ujaran kebencian.

“Di Facebook, ada fitur yang menyajikan kembali peristiwa tiap tahun, selalu berulang, “Your Memory”, yang menjadi salah satu pemicu. Jadi ujaran kebencian yang pernah diunggah terkait dengan peristiwa tertentu bisa hadir kembali, diangkat lagi, membuat panas lagi,” kata Citra, peserta FGD.

Di bawah ini adalah daftar ekspresi ujaran kebencian berbasis etnik dan agama berdasarkan FGD di Bandung, Jawa Barat.

**Gambar 2.** Ekspresi Ujaran Kebencian Berbasis Etnik dan Agama di Provinsi Jawa Barat (Bahasa Sunda)

No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.)	Keterangan tambahan
1	Antek aseng	Untuk melecehkan tokoh politik dan ekonomi yang dianggap memihak kepentingan Cina	Ini menarget tokoh nasional maupun daerah.
2	“Kenapa medok?” “Ngomong medok” Medok: <i>aksen Jawa</i> )	Disampaikan oleh orang Sunda untuk melecehkan orang Jawa.	
3	Jawa kowek <i>Kowek</i> merujuk pada kata “kowé” (bahasa Jawa) yang memiliki arti “kamu”.		
4	“Dasar jamet” “Diem lu jmet” Jamet ( <i>jawa metal</i> )		
5	“Dasar jawir” Jawir ( <i>jawa ireng/ jawa hitam</i> )		
6	“Hei rojali” Rojali ( <i>rombongan jawa lieur</i> ) <i>Lieur: bingung</i>		
7	Tukang bakso	Dari orang Sunda kepada laki-laki Jawa	Panggilan dari suku Sunda terhadap laki-laki dan perempuan suku Jawa, dan kerap ditemukan pada konteks hinaan.
8	Pembantu rumah tangga	Dari orang Sunda kepada perempuan Jawa	

No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.	Keterangan tambahan
9	<p>“Eweuh Sunda mah nu Kristen teh”  <i>(tidak ada orang Sunda yang Kristen)</i></p> <p>“Sunda mah kabeh Islam” <i>(orang Sunda semuanya Islam)</i></p> <p>“Ieu mah orang Sunda nu dijual ku Indomie” <i>(ini orang Sunda yang dijual menggunakan Indomie, dinilai sebagai representasi Tionghoa yang Kristen)</i></p> <p>“Teteh eh kaka dibilang orang Kristen karena gapake kerudung”  <i>(Kakak dibilang orang Kristen karena tidak pakai jilbab)</i></p>	<p>Disampaikan oleh orang Sunda Muslim untuk melecehkan orang pendatang yang beragama Kristen.</p>	
10	<p>“Da etamah lain Sunda” <i>(dia bukan orang Sunda)</i></p>	<p>Ditujukan kepada kaum pendatang (biasanya suku Jawa)</p>	
11	<p>“Eta orang seberang”  <i>(dia orang seberang)</i></p>	<p>Ditujukan kepada kaum pendatang (biasanya suku Jawa)</p>	
12	<p>“Balik siah ka Cina”  <i>(pulang saja ke Cina)</i></p>	<p>Disampaikan dalam konteks menghina</p>	<p>Kerap ditemukan bila ada konflik yang melibatkan warga keturunan Tionghoa.</p>

No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.)	Keterangan tambahan
	“Balik kalembur didinya, balik ka Cina siah rek naon didieu” ( <i>pulang saja ke kampung halaman Cina, mau apa di sini</i> )		

## FGD di Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Waktu : Selasa, 15 Agustus 2023  
 Pukul : 08.30–13.30 WIB  
 Tempat : Hotel Luwansa, Palangkaraya  
 Fasilitator : Masduki dan Fahriannor  
 Peserta : 12 peserta (daftar peserta terlampir)

Diskusi dibuka dengan pengantar oleh Masduki, selaku Ketua PR2Media dan mewakili penyelenggara. Masduki menegaskan beberapa hal terkait latar belakang dan urgensi kegiatan FGD serta tahapan pelaksanaan FGD. Pertama, menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu 2024, dengan mempertimbangkan semaraknya *digital/cyber election* (diskursus kontestasi kandidat Presiden Indonesia di media sosial), Masduki menegaskan pentingnya menciptakan kondisi percakapan digital yang harmonis di media sosial, melalui mitigasi disinformasi, hoax dan ujaran kebencian yang berbasis suku, agama dan sejenisnya. Problemanya, di Indonesia khususnya suku-suku di luar Jawa belum tersedia kamus khusus soal diksi yang mengandung, berpotensi dipakai sebagai pemicu konflik yang bisa diacu oleh semua pihak untuk kerja kerja publik moderasi konten digital dalam pendekatan linguistik.

Kedua, selain pengguna media sosial memperkuat literasi diri, penciptaan harmoni di media sosial adalah tugas platform digital, yang berskala global. Riset PR2Media tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kinerja platform dalam moderasi konten masih lemah, antara lain mereka belum memiliki daftar diksi berbasis etnik di Indonesia, yang menjadi alat untuk mitigasi konten bertendensi ujaran kebencian dan disinformasi.

Ketiga, pentingnya kesadaran dan partisipasi publik dalam skala luas mulai akademisi, regulator bidang media, ahli hukum media, aktivis sosial, hingga birokrat di luar Jakarta untuk mengidentifikasi berbagai potensi konflik sosial di media digital. Forum FGD ini dapat dilihat sebagai upaya kecil identifikasi diksi berbasis bahasa lokal khususnya Dayak di Kalimantan Tengah untuk diajukan kepada pengelola platform dalam kerangka moderasi konten. Dalam jangka panjang, FGD ini harus ditindaklanjuti upaya sistematis pembuatan kamus berbahasa Dayak yang berorientasi kepada kebutuhan percakapan digital yang sehat. Kerja ini selaras dengan gerakan meminta tanggung jawab platform digital mengembangkan ruang publik yang sehat, dan mendorong mereka lebih aktif moderasi konten.

Dayak merupakan suku terbesar di Kalimantan, ada sedikitnya 6 juta warga asli Dayak yang kini bermukim di Kalimantan Tengah, Selatan, Barat dan Timur. Ada lebih dari 400 sub-suku Dayak. Suku terbesar berikutnya adalah suku Banjar, yang bermukim di Kalimantan Selatan dan Utara. Dayak memiliki sejarah panjang sebagai suku tertua dan dalam beberapa tahun ini rawan terpapar konflik antar etnik yang bermukim di Kalimantan maupun konflik antaragama lokal yang dipicu perilaku sosial di media digital. Misalnya, kasus pernyataan Edy Mulyadi terkait kawasan Ibu kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur yang memicu amarah warga Dayak karena dianggap sarang *jin buang anak*, dan lain-lain.

Para peserta FGD secara umum melihat sejumlah kecenderungan perilaku sosial di media digital yang potensial memicu konflik karena mengandung ujaran kebencian. Di dalam aplikasi TikTok, misalnya pembuatan konten ritual doa doa suci dianggap cenderung mengejek. Dalam kelompok percakapan melalui aplikasi WhatsApp, kerap kali muncul ujaran *bungah*, artinya bodoh, kemudian *rapuy* artinya gila atau sinting. Juga ujaran “dasar antahu”, antahu itu artinya anjing. Antahu itu bersifat keras, mengutarakan kebencian terhadap orang lain. Dasarantahu, dasar anjing, atau dasar denyu, dasar anjing. Awalnya, pemakaian kata denyu itu bermakna biasa, tetapi kalau ditambah kata dasar, nadanya bisa kebencian. Salah satu sub bahasa Dayak, yaitu bahasa Dayak Maanyan, kerap kali berpadu dengan bahasa Indonesia atau menggunakan kata-kata dari bahasa Indonesia.

Dalam pandangan klasik, media itu adalah *mirror of society*, yaitu media sebagai cermin masalah kita, sebagai penyalur apa yang muncul di masyarakat. Konsep klasik ini tentu sudah tidak pas. Kini media itu bekerja sendiri. Contoh kecil adalah siapa yang bisa mengatur Meta dan Google? Keduanya adalah perusahaan global yang berpusat di Amerika Serikat. Kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya, tetapi mereka masuk ke wilayah Indonesia sebagai sebuah korporat. Oleh karena itu, mereka seharusnya mengikuti aturan dan nilai yang berkembang di Indonesia, karena mereka menggunakan aktivitas digital kita untuk menggerakkan bisnis mereka. Dalam konteks perilaku di media digital, platform digital perlu memiliki peran yang ekstensif dalam memitigasi disinformasi dan ujaran kebencian.

Di Uni Eropa ada regulasi Digital Services Act yang ditujukan untuk mengatur kewajiban platform media sosial terkait konten ilegal. Sebelumnya ada Disinformation Act di Jerman, yang mengatur jika platform media sosial memuat *hate speech*, penyelenggaranya diberi waktu 24 jam untuk menurunkan konten tersebut. Jika

tidak dilakukan, maka platform akan terkena denda. Pemerintah Jerman menyoal pelaku usaha digital, bukan produsen konten atau pengakses. Memang penting dicatat, platform media sosial global sudah memiliki *community guideline* yang mengatur boleh atau tidaknya sebuah konten hadir di platform tersebut. Namun, pengguna juga harus aktif melaporkan kepada platform, konten atau ekspresi tertentu yang dianggap tidak layak muncul di sana. Bayangkan, kalau ada 170 juta pengguna media sosial di Indonesia yang tidak peduli dan tidak melakukan cara yang sama.

FGD di Palangkaraya menemukan sejumlah kata dan frasa yang biasa dipakai dalam ujaran kebencian secara daring maupun luring untuk menarget kelompok etnik dan agama tertentu. Misalnya, “babuhan salib”, sebuah ungkapan dalam bahasa Banjar yang disampaikan oleh orang Banjar Muslim untuk menyerang orang Dayak yang beragama Kristen.

“Babuhan salib ini biasanya disampaikan oleh orang Banjar yang Muslim kepada orang Dayak yang beragama Kristen. Ungkapan ini juga bisa disampaikan oleh orang Dayak beragama Islam kepada Dayak yang Kristen. Buhun itu artinya kamu. Jadi ungkapan ini berarti ‘kamu itu Kristen!’ yang bersifat mengolok, bahwa ada garis batas di antara kita. Meskipun menurut saya toleransi antar umat beragama di Kalimantan Tengah ini sudah baik, harmonis, tetap ada kata-kata yang kadang muncul dan bisa memicu permusuhan,” kata Sri Astuty, peserta FGD.

“Contoh lain yang senada dengan itu adalah ‘babuhan sabalah’, yang artinya kamu orang sebelah, ini maksudnya kamu agama sebelah, yang disampaikan oleh orang Muslim kepada orang Kristen,” kata Annisa, peserta FGD.

Bagaimanapun, para peserta FGD sepakat bahwa ujaran kebencian bersifat kontekstual. Dalam kondisi tertentu, sebuah ekspresi bisa bermakna netral, tapi bisa memicu konflik karena diucapkan dalam konteks tertentu.

“Ada kata-kata mengarah pada ujaran kebencian, ada yang masuk kategori pameo, hanya sindiran, dan ketika dilihat lagi konteks kalimatnya masuk sebagai ujaran kebencian. Awalnya, berupa satu kalimat yang bermakna ambigu, multitafsir, bahkan bisa jadi hanya sebuah kalimat tanpa makna. Tetapi, ketika menjadi satu kesatuan kalimat panjang, bermakna ujaran kebencian. Misalnya, apakah *bakei* (artinya monyet) itu ujaran kebencian? Ini bergantung konteksnya. Monyet itu kategori untuk binatang, tapi ketika ia dipakai menggambarkan sosok seorang manusia dari etnik tertentu, ia menjadi ujaran kebencian,” kata Sepmiwawalma, peserta FGD, yang merupakan penyusun kamus bahasa Dayak Ngaju.

Selanjutnya, sejumlah peserta FGD menyampaikan, platform digital yang paling sering menampilkan ujaran kebencian adalah Facebook, disusul WhatsApp<sup>2</sup>, YouTube, Tiktok, dan Twitter (X). Ujaran kebencian tidak selalu muncul di konten utama yang diunggah, tetapi di kolom komentar. Di Tiktok, misalnya ada video dengan komentar di bawahnya berisi ekspresi dalam bahasa daerah yang memuat ujaran kebencian. Di Kalimantan Tengah,

---

<sup>2</sup> Perlu dicatat bahwa sebagai sebuah aplikasi percakapan dengan *end-to-end encryption*, WhatsApp tidak melakukan moderasi konten karena penyelenggara platform tidak bisa melihat isi percakapan pengguna, sehingga WhatsApp tidak masuk ke dalam wilayah riset ini.



ujaran kebencian lebih banyak muncul terkait dengan agama yang mencuat sebagai efek dari isu nasional tentang kontestasi politik, yang kemudian merembet ke pembicaraan tentang anti suku tertentu.

Namun, para peserta sepakat bahwa ujaran kebencian berbasis etnik dan agama dalam bahasa Banjar dan Dayak jarang muncul di media sosial, karena lebih umum disampaikan dalam percakapan luring.

Seusai pelaksanaan FGD, tim PR2Media melakukan *talkshow* tentang mitigasi ujaran kebencian di media sosial yang disiarkan langsung oleh RRI Palangkaraya, salah satu media yang populer di Kalimantan Tengah.

Di bawah ini adalah daftar ekspresi ujaran kebencian berbasis etnik dan agama berdasarkan FGD di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

**Gambar 3.** Ekspresi Ujaran Kebencian Berbasis Etnik dan Agama di Provinsi Kalimantan Tengah  
(Bahasa Banjar, Dayak Ngaju, dan Dayak Maanyan)

No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.)	Keterangan tambahan
1	Babuhan salib, artinya kamu itu Kristen.	Digunakan oleh orang Banjar yang Muslim untuk menyerang orang Dayak yang beragama Kristen. Dalam perkembangannya, frasa ini juga digunakan oleh Dayak Muslim untuk menyerang Dayak Kristen.	Mayoritas warga di Kalimantan Tengah merupakan orang Dayak, yang mayoritas beragama Islam.

No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.)	Keterangan tambahan
2	Babuhan kuyang, artinya kamu itu Dayak dengan konotasi yang merendahkan.	Kuyang adalah orang Dayak yang dipercaya memiliki ilmu mistik.	Di Kalimantan, terdapat banyak cerita tentang orang-orang Dayak yang memiliki kemampuan mistik.
3	“Dasar Dayak babuhan kuyang” dan “Dasar kuyang”		
4	Babuhan sabalah, artinya kamu orang sebelah (agama sebelah)	Disampaikan oleh orang Muslim ke Kristen dan sebaliknya.	

Di bawah ini adalah ekspresi yang biasa digunakan oleh warga di Kalimantan Tengah untuk menyatakan kebencian atau kemarahan mereka, meski tidak secara khusus menyasar etnik atau agama tertentu.

1	Bungul ( <i>bodoh</i> ) – Bahasa Banjar “Dasar bungul” ( <i>dasar bodoh</i> ) “Bungul banar” ( <i>bodoh sekali</i> )	Ungkapan atas kekesalan atau kemarahan pada orang lain	Frasa tidak bisa sendiri, Bahasa Banjar “ <i>bungul</i> ” sering juga digunakan untuk menyebut anak ketika marah atau orang lain. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya.
2	Mameh ( <i>bodoh/bebal</i> ) – Bahasa Dayak Ngaju “Mameh tutu” ( <i>bodoh sekali</i> ) “Puna mameh ih” ( <i>memang bodoh sekali</i> )	Ungkapan atas kekesalan atau kemarahan pada orang lain	Frasa tidak bisa sendiri, kata “ <i>mameh</i> ” sering diucapkan dan dianggap hal yang biasa, namun jika bertambah dengan frasa lain maka

No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.)	Keterangan tambahan
	"Leha kamemehmu" ( <i>aduh bodohnya kamu</i> )		akan berdampak untuk menyulut kemarahan. Ucapan ini diucapkan baik
	"Mameh bara beruk" ( <i>bodoh daripada monyet besar</i> )		kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya
3	Tambuk ( <i>busuk</i> ) – Bahasa Banjar "Dasar tambuk" ( <i>dasar busuk</i> ) "Tambuk banar urangnya" ( <i>busuk banget orang itu</i> )	Ungkapan atas kekesalan atau kemarahan pada orang lain	Frasa tidak bisa sendiri, kata " <i>tambuk</i> " ini untuk menggambarkan kondisi seseorang yang lebih parah dari kata bodoh. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya
4	Matei ( <i>mati</i> ) – Bahasa Dayak Ngaju "Matei munu" ( <i>mati kena tombak</i> ) "Bajilek matei" ( <i>tidak suka sama sekali</i> ) "Matei lepah" ( <i>mati semua</i> ) "Matei ahang" ( <i>hidup tidak berguna</i> ) "Matei baduruh" ( <i>mati seluruh untuk satu keluarga</i> )	"Matei baduruh" – Sumpah kepada seseorang atau satu keluarga agar sakit atau meninggal secara beruntun	Frasa tidak bisa sendiri, kata <i>mati</i> berarti hal yang biasa, bisa disebut pada manusia ataupun hewan dan tumbuhan, namun jika ditambah dengan kata lain, maka akan menumbuhkan kengerian dan ketakutan. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya

No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.)	Keterangan tambahan
	“Matei kajapi” ( <i>teramat sangat pemalas</i> )		
5	Humung ( <i>bodoh/ memiliki etika yang rendah</i> ) – Bahasa Dayak Ngaju “Humung bara galembung” ( <i>bodoh dari balon</i> )	“Humung bara galembung” – Representasi rasa jengkel atau kecewa pada seseorang atau kelompok tertentu	Frasa tidak bisa sendiri, kata “ <i>humung</i> ” memiliki persamaan dengan kata tambuk dalam Bahasa Banjar, sebutan yang paling kasar juga. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya
6	Bakei ( <i>monyet</i> ) – Bahasa Dayak Ngaju “Bau sama bakei” ( <i>muka seperti monyet</i> )	“Bau sama bakei” _ Ungkapan untuk menyebut wajah orang lain mirip monyet	Frasa tidak bisa sendiri, kata “ <i>bakei</i> ” memiliki pengertian yang kasar sama seperti jika menyebut anjing, babi, ular dalam Bahasa Dayak Ngaju. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya
7	Asu ( <i>anjing</i> ) – Bahasa Dayak Ngaju “Belum kilau asu” ( <i>hidup seperti anjing</i> ) “Kilau asu kenceng”	“Kilau asu kenceng” – Ungkapan kasar kepada seseorang atau kelompok yang bertindak seperti perilaku anjing (melakukan segala cara untuk mencapai kepentingan)	Frasa tidak bisa sendiri, kata <i>asu</i> sebagai anjing adalah hal yang lumrah jika tidak dipasangkan dengan kata lain. Ucapan ini diucapkan baik

No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.)	Keterangan tambahan
	“Asu jelap para” ( <i>menjilat seperti anjing</i> )	“Asu jelap para” – Ungkapan kecewa kepada seseorang yang menghambakan diri demi sesuatu	kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya
8	Tanjaru ( <i>bohong</i> ) – Bahasa Dayak Ngaju “Are tanjaru, jatun gawi” ( <i>banyak bohong, tidak ada kerja</i> )	Ungkapan atas perlakuan orang lain yang suka membual/berbohong	Frasa tidak bisa sendiri, kata “ <i>tanjaru</i> ” lebih mengarah pada menyebut orang yang berbohong secara berlebihan dalam pekerjaan ataupun jika dipercayai. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya
9	Kirang ( <i>kotoran</i> ) – Bahasa Dayak Ngaju Kilau kirang ( <i>seperti kotoran</i> ) Kuman kirang ( <i>makan kotoran</i> )	Ungkapan yang paling jelek (kasta terendah dalam bahasa Dayak Ngaju) untuk menyebut orang yang paling tidak disukai atau dibenci	Frasa tidak bisa sendiri. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya
10	Panipu ( <i>penipu</i> ) – Bahasa Dayak Ngaju “Panipu uluh jikau” ( <i>penipu orang tersebut</i> )	Ungkapan atas perilaku seseorang yang membodohi orang lain	Frasa tidak bisa sendiri. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya
11	Badaha ( <i>berdarah</i> )- Bahasa Dayak Ngaju	Ungkapan dalam kondisi marah atau dalam pertengkaran	Frasa tidak bisa sendiri. Ucapan ini diucapkan baik

No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.)	Keterangan tambahan
	<p>“Matei badaha ikau” (<i>mati berdarah kamu</i>)</p> <p>“Daha imbayar daha” (<i>darah dibayar darah</i>)</p>		kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya
12	<p>Paleng para (<i>Bangsat</i>) – Bahasa Dayak Ngaju</p> <p>Puna paleng para ih uluh jikau (<i>Bangsat orang ini</i>)</p>	Ungkapan kemarahan	Frasa tidak bisa sendiri. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya
13	<p>Bajat (<i>Binatang yang mengerikan menyerupai setan</i>) – Bahasa Dayak Maanyaan</p> <p>Bajat tuu ulun ina (<i>sungguh orang ini seperti binatang setan</i>)</p>	Ungkapan atas kekesalan maupun kemarahan pada orang lain	Frasa tidak bisa sendiri, kata ini termasuk dalam frasa yang sangat kasar. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya
14	<p>Antahu (<i>anjing</i>) – Bahasa Dayak Maanyan</p> <p>Tuu antahu ulun iri (<i>seperti anjing orang itu</i>)</p>	Ungkapan atas kekesalan maupun kemarahan pada orang lain	Frasa tidak bisa sendiri. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya
15	<p>Warik (<i>monyet/ kera</i>)- Bahasa Dayak Maanyan</p> <p>Budas warik upu iri (<i>Dasar monyet laki-laki itu</i>)</p>	Ungkapan untuk menyebut orang yang memiliki kelakuan tercela.	Frasa tidak bisa sendiri. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya

No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.)	Keterangan tambahan
16	Sapa ( <i>menyumpah</i> )- Bahasa Dayak Maanyan Naan die sapakuo hanyu sangasese aku tarus jari anrakei ( <i>Kusumpah kamu jadi binatang selalu mengolok- olokku</i> )	Ungkapan jika seseorang sudah marah, biasanya bisa mengucapkan kata sumpah dengan berbagai sebutan tambahan seperti nama-nama binatang	Frasa tidak bisa sendiri. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya
17	Adiau kalawik ( <i>bangsat/setan</i> )- Bahasa Dayak Maanyan Hanyu ri tuu adiau kalawik ( <i>setan kamu ini</i> )	Ungkapan kemarahan	Frasa tidak bisa sendiri, penyebutan kata ini menggambarkan kemarahan yang lebih mengarah kepada sebutan seperti setan. Ucapan ini diucapkan baik kepada sesama suku Dayak maupun kepada suku lainnya

## FGD di Jayapura, Papua

Waktu : Sabtu, 16 September 2023  
Pukul : 13.00–15.00 WIB  
Tempat : Hotel Horison Kotaraja, Jayapura  
Fasilitator : Engelbertus Wendratama dan Dewi Anggraeni  
Peserta : 12 peserta (daftar peserta terlampir)

FGD ini bertujuan mendaftar berbagai kata dan frasa dalam bahasa lokal di Provinsi Papua yang biasa dipakai oleh pengguna media

sosial untuk menyampaikan ujaran kebencian berbasis etnik dan agama di platform media sosial terbuka seperti YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan X (dulu Twitter).

Diskusi ini diikuti oleh 12 peserta dari beragam latar profesi seperti pemuka agama, akademisi, jurnalis, ahli bahasa, dan mahasiswa. Mereka juga terbagi rata antara orang asli Papua dan orang pendatang, untuk mendapatkan perspektif yang seimbang mengingat ketegangan etnik dan agama di Papua selama ini umumnya terjadi antara orang asli Papua dan orang pendatang.

Moderator FGD, Engelbertus Wendratama, membuka diskusi dengan menyampaikan latar belakang dan tujuan riset. Selanjutnya, moderator mengajak peserta mendiskusikan satu demi satu kata dan frasa yang sudah dituliskan oleh peserta FGD di Google Form, yang tautannya dikirim oleh PR2Media bersama dengan undangan. Ini adalah tahap utama FGD, yaitu para peserta dan moderator mendiskusikan kata dan frasa yang biasa dipakai untuk menyampaikan ujaran kebencian berbasis etnik dan agama oleh warga Papua di media sosial.

Papua adalah provinsi di Indonesia dengan tingkat kerentanan konflik cukup tinggi, yang dipantik oleh isu separatisme, etnik, dan agama (Sabara, 2023). Secara umum, seluruh kata dan frasa yang didiskusikan di FGD memotret ketegangan laten berbasis etnik dan agama yang hidup di masyarakat Provinsi Papua menurut dua kategori besar, seperti terurai di bawah ini.

Pertama, ketegangan antara orang asli Papua (OAP) dan orang pendatang. Orang pendatang ini umumnya beragama Islam dengan berbagai etnik, seperti Jawa, Bugis, Makassar. Contoh ekspresi ujaran kebencian yang disampaikan oleh OAP kepada pendatang antara lain “Dasar BBM” (untuk menyebut orang Bugis, Buton, dan Makassar, yang umumnya merupakan penguasa perdagangan pasar tradisional terutama yang menjual ikan dan buah pinang)



dan “agama penjajah” untuk menyebut orang pendatang yang umumnya beragama Islam. Di sisi lain, orang pendatang juga memiliki ekspresi kebencian terhadap OAP seperti “Dasar monyet”, “Turunan monyet”, “Dasar Amber”, dan “Tentara Injil”, mengingat mayoritas OAP beragama Kristen (Protestan dan Katolik).

Sebagai contoh, monyet adalah stereotip penghinaan terhadap OAP. Bagi OAP, “monyet” dianggap lebih merendahkan daripada “anjing” atau “babi”.

“Anjing dan babi masih bisa diterima, tapi tidak jika monyet,” kata Dewi, peserta FGD.

“Di pertandingan sepakbola, kata itu (monyet) masih dilontarkan itu. Dan itu sering terjadi ketika Persipura bertanding di luar Papua, terutama di Jawa. Dan kalau kita lihat di berbagai media sosial, itu juga ada. Video itu sempat tersebar luas di TikTok,” kata Andre, peserta FGD.

Contoh lain, ekspresi “agama penjajah” yang disampaikan oleh OAP beragama Kristen kepada orang pendatang yang beragama Islam.

“Agama penjajah itu diidentikkan dengan agama Islam yang ada di Papua. Papua juga kadang dijuluki sebagai ‘tanah Injil’, dan agama orang pendatang yang mayoritas merupakan Islam itu disebut ‘agama penjajah’. Ungkapan ini juga pernah saya lihat di Facebook. Bahkan pimpinan agama pun menulis itu, dan itu menjadi polemik,” kata Toni, peserta FGD.

“Mungkin itu (agama penjajah) juga bisa dihubungkan dengan sentimen sosial mengingat orang pendatang itu

umumnya keadaan ekonominya lebih baik atau menguasai sektor-sektor ekonomi tertentu. Jadi ada alasan marjinalisasi ekonomi juga di sana,” kata Dian, peserta FGD.

Sebagai gambaran, di Jayapura, Ibu Kota Provinsi Papua, komposisi penduduk yang relatif berimbang dari segi agama (Islam dan Kristen) ikut memicu ketegangan di antara masyarakat (Alhamid & Suryo, 2014). Riset Alhamid dan Suryo tersebut menyatakan bahwa ketegangan berbasis agama yang berkembang di Papua memiliki keterkaitan erat dengan persoalan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang bersifat dinamis. Meski demikian, peneliti PR2Media juga mencatat hubungan yang baik antar umat beragama di Papua, yang terlihat dari indeks kerukunan umat beragama yang disusun oleh Kementerian Agama setiap tahun. Pada 2021, Provinsi Papua menempati peringkat kedua sebagai provinsi dengan indeks kerukunan umat terbaik setelah Nusa Tenggara Timur (Ayu, 2021), lalu pada 2022 menempati peringkat ke-8 terbaik nasional (Kementerian Agama, 2022). Menurut sejumlah referensi, salah satu faktor yang bisa diatribusikan terhadap kerukunan itu adalah kearifan lokal “satu tungku, tiga batu”, yang berasal dari Fakfak di Papua Barat dan berkembang ke seluruh Tanah Papua. Ini adalah analogi dari tungku untuk memasak dengan tiga buah batu sebagai penopang. Tungku dimaknai sebagai “tanah, daerah, atau bangsa”. Lalu, tiga batu adalah tiga agama utama yang dianut oleh masyarakat Fakfak, yaitu Islam, Protestan, dan Katolik (Saugi, et al. 2022). Kearifan lokal itu telah berkembang menjadi falsafah hidup masyarakat Papua dalam kehidupan bermasyarakat dan digunakan oleh berbagai pihak untuk memajukan kerukunan umat beragama di Papua (Firdaus, 2014).

Kedua, ketegangan di antara sesama OAP, yaitu antara orang pantai dan orang gunung. Orang pantai adalah suku-suku asli Papua

yang secara tradisional hidup di daerah pantai (pesisir) dan sekarang menjadi wilayah urban seperti Jayapura, Abepura, Biak, dan Serui. Karena wilayah mereka lebih dekat dengan pusat kegiatan sosial dan ekonomi, mereka secara umum lebih mudah mengakses sumber daya sosial ekonomi dan lebih sering berinteraksi dengan orang pendatang. Sementara itu, orang gunung adalah suku-suku yang secara tradisional berasal dan menetap di daerah pegunungan. Namun, seiring perkembangan waktu, semakin banyak orang pegunungan yang melakukan aktivitas politik dan ekonomi di wilayah pantai (urban) yang memunculkan ketegangan dengan orang pantai.

Sebagai contoh, umpatan “dasar Amber” yang awalnya hanya disampaikan oleh OAP kepada orang pendatang non OAP (Jawa, Bugis, dll). Namun, seiring waktu, istilah ini berkembang dan dipakai kepada pendatang siapa pun, termasuk OAP yang menjadi pendatang di daerah tertentu.

“Saya baca bukunya Dr. Ahmad, seorang antropolog dari Universitas Cenderawasih, tentang ‘Amber’. Ia menyebutkan tentang bagaimana orang amber adalah dari luar yang datang dan menetap di Papua. Di sini, ada konteks persaingan ekonomi, disebut orang Amber karena konteks ekonominya lebih baik. Namun, kini penggunaannya meluas, bukan hanya untuk orang pendatang non OAP,” kata Yewen, peserta FGD.

“Jika saya baca tulisan Izak Morin dari Universitas Cenderawasih, saya lihat ‘Amber’ itu bahasa Biak (sebuah pulau di Provinsi Papua) yang menunjukkan status sosial dan ditunjukkan kepada OAP yang datang ke suatu daerah. Misalnya ada orang Serui yang menjadi pendatang di Wamena, dia bisa dijuluki ‘Amber’. Jadi siapa pun yang

datang ke suatu tempat, itu bisa dikatakan ‘Amber’, karena dianggap menggeser kepentingan orang-orang setempat,” kata Andre, peserta FGD.

“Dulu, pada tahun 2000 atau 1999, ada Forum Masyarakat Amber, saat itu ada ketegangan Papua Merdeka, saat itu almarhum Theys masih ada. Kemudian ada usikan terhadap orang Islam dari non islam terkait kasus (kekerasan antar umat Muslim dan Kristen) di Ambon, sehingga teman-teman membentuk forum tersebut. Tujuannya menjembatani komunikasi antara orang OAP dan non OAP. Namun, saat ini maknanya bergeser, terutama ketika mulai pemekaran provinsi Papua menjadi Papua dan Papua Barat, ini sangat berdampak sekali. Jadi memang ada pergeseran makna dan istilah amber. Dulu, itu untuk orang non papua saja, tapi kemudian bergeser meluas menjadi OAP dari daerah lain,” kata Hamim, peserta FGD.

Ketegangan di antara OAP itu umumnya mengikuti garis tujuh wilayah adat di Tanah Papua, mengingat pengaruh kesukuan di Papua sangatlah kuat (Sugandi, 2008). Tujuh wilayah adat inilah yang menjadi dasar pemekaran provinsi di Papua, yang saat ini menjadi enam provinsi di tanah Papua, dari tujuh provinsi yang ditargetkan (Joumilena, 2022). Tujuh wilayah adat itu adalah Mamta, Saereri, Anim Ha, La Lago, dan Mee Pago (dulu di Provinsi Papua), serta Domberai dan Bomberai (dulu di Provinsi Papua Barat). Di dalam tujuh wilayah adat itu terdapat 255 suku, dengan masing-masing memiliki bahasa dan budaya yang berbeda (Jumaidi & Indriawati, 2023).

Tujuan pemekaran provinsi adalah pemerataan sumber daya ekonomi dan politik melalui pendekatan sosial budaya sekaligus

meredam potensi konflik horizontal di antara warga Papua (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022). Meski demikian, sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat Papua memberikan catatan tentang potensi konflik yang perlu diantisipasi akibat pemekaran provinsi, mulai dari polarisasi antara masyarakat pegunungan dan pantai (Ekaptiningrum, 2022), penentuan Ibu kota provinsi baru, penetapan kabupaten mana yang masuk ke satu provinsi tertentu, hingga proses pengisian aparatur sipil negara di provinsi baru (Suchyo, 2022).

Melihat konteks sosial politik di atas, dan berdasarkan temuan FGD, peneliti PR2Media menilai, potensi konflik di Provinsi Papua yang berbasis ujaran kebencian di media sosial perlu disikapi oleh pemerintah Indonesia dan platform media sosial secara serius, sehingga penyebaran ekspresi-ekspresi tersebut tidak merugikan integrasi sosial di Provinsi Papua.

Di bawah ini adalah daftar ekspresi ujaran kebencian berbasis etnik dan agama di Papua, yang mencakup bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dialek Papua, dan bahasa daerah Papua, dengan konteks dan keterangan penggunaannya. Secara umum, ekspresi ujaran kebencian di bawah ini muncul di berbagai platform media sosial, yaitu YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan X (dulu Twitter).

Selama proses FGD, pemahaman moderator terhadap ungkapan-ungkapan dalam bahasa lokal Papua dan konteksnya dibantu oleh peneliti mitra PR2Media di Papua yaitu Dewi Anggraeni, yang hampir 20 tahun tinggal dan bekerja di Provinsi Papua sebagai pegawai pemerintah.

**Gambar 4.** Ekspresi Ujaran Kebencian Berbasis Etnik dan Agama di Provinsi Papua  
(Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia Dialek Papua,  
dan Bahasa Daerah di Papua)

No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.)	Keterangan tambahan
1	“Dasar monyet” dan “Turunan monyet”	Untuk merendahkan orang asli Papua (OAP), biasa disampaikan oleh orang Jawa.	Monyet adalah stereotip penghinaan terhadap OAP. Bagi OAP, “monyet” dianggap lebih merendahkan daripada “anjing” atau “babi”. “Anjing dan babi masih bisa diterima, tapi tidak jika monyet,” kata salah satu peserta FGD.
2	“Dasar Amber!”	1. Umpatan yang sering disampaikan oleh OAP kepada orang non OAP (Jawa, Bugis, dll). 2. Dulu untuk pendatang non Papua, tapi istilah ini berkembang dan dipakai kepada pendatang siapa pun, termasuk OAP yang menjadi pendatang di daerah tertentu.	Amber merupakan bahasa Biak yang mengacu pada perbedaan status sosial, yang ditujukan kepada pendatang (meski pendatang ini juga OAP). Dulu ada Forum Masyarakat Amber, untuk menjembatani perbedaan antara OAP dan kaum pendatang, tapi saat ini sudah tidak aktif lagi.
3	a. “Agama penjajah” b. “Tentara Injil”	a. “Agama penjajah” untuk menyerang kaum pendatang di Papua yang	Menurut salah satu peserta FGD, yang merupakan perwakilan organisasi

No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.)	Keterangan tambahan
		<p>mayoritas beragama Islam.</p> <p>b. “Tentara Injil” untuk menyerang orang Papua beragama Protestan maupun Katolik.</p>	<p>agama di Papua, tokoh-tokoh agama di Papua juga menyampaikan frasa “agama penjajah” dan “tentara Injil” dalam khotbah mereka, yang memperuncing ketegangan agama di Provinsi Papua.</p> <p>Ada ketegangan sosial ekonomi juga di sana, yaitu kaum pendatang biasanya memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih baik daripada OAP.</p>
4	“Hitam badaki!”	Ini adalah makiian dan ditujukan kepada OAP	
5	“Makan pancuri” (bahasa Indonesia dialek Papua) yang artinya makan hasil curian.	Sering dipakai untuk menyerang orang suku pegunungan maupun orang pendatang (dua arah)	Dulu, ekspresi “makan pancuri” hanya dipakai untuk menyerang orang suku pegunungan, tapi sekarang berkembang dan dipakai untuk menyerang orang pendatang juga.
6	“Dasar Lao Lao” dan “Nau Nau” (binatang kanguru pohon), dipakai untuk menyerang orang lain yang dianggap bodoh	Dipakai untuk menyerang kaum pendatang maupun OAP (dua arah)	

No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.)	Keterangan tambahan
7	Ongko (penyebutan untuk orang keturunan Cina yang pelit, kikir)	Serangan berbasis etnik terhadap keturunan Cina/ Tionghoa, yang dianggap selalu pelit.	
8	“Dasar Komen”	Sebutan untuk OAP dengan konotasi menghina.	
9	“Dasar Koteka”	Disampaikan oleh orang pesisir dan pendatang kepada orang pegunungan.	
10	Anggun (anak gunung) dan Masgun (masyarakat gunung)	Disampaikan oleh orang pesisir dan pendatang kepada OAP yang berasal dari pegunungan Papua.	
11	ATM (Anak Tanah Modifikasi)	Disampaikan untuk mengejek sesama OAP yang meluruskan rambut atau mewarnai rambut.	Ditujukan untuk meragukan identitas Papua orang yang dimaki. Rambut keriting dianggap sebagai identitas asli Papua, yang semestinya dibanggakan, bukan malah diubah.
12	“Dasar BBM” (orang Bugis, Buton, dan Makassar)	Disampaikan oleh OAP kepada orang Bugis, Buton, dan Makassar.	Ini ditujukan kepada ketiga suku tersebut sebagai penguasa pasar, terutama pasar yang menjual ikan dan pinang.
13	“Ko pu tanah ini kah?”	Disampaikan oleh OAP kepada orang	“Istilah-istilah seperti ini banyak muncul seiring



No	Kata atau frasa dalam bahasa lokal	Konteks penggunaan (Aktor, situasi, waktu, dsb.)	Keterangan tambahan
		pendatang. Namun, seiring waktu, ini juga disampaikan oleh orang gunung kepada orang pesisir.	dengan pemekaran provinsi,” kata salah seorang peserta FGD, yang merupakan warga Sentani dan sekarang ditugaskan di Papua Tengah, sebuah provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua.
14	“Dasar hama” dan “Hama dorang”	Disampaikan oleh OAP kepada OAP suku pegunungan yang berkebun di cagar alam maupun di daerah gunung lain yang bukan wilayah aslinya.	
15	Sukbung	Disampaikan oleh OAP kepada orang pendatang yang dianggap akan menguasai lahan atau ekonomi OAP	
16	Srakon	Disampaikan oleh OAP kepada orang pendatang yang dianggap akan merampas hak OAP	
17	“Makhluk mutan”	Disampaikan kepada anak yang merupakan keturunan orang asli Papua dan non Papua.	Salah satu peserta FGD adalah perempuan keturunan orang asli Papua dan non Papua. Dia menyatakan beberapa kali menerima sebutan itu, baik di media sosial maupun secara luring.

## Penutup

Riset yang dilakukan melalui FGD tersebut menemukan bahwa ujaran kebencian daring di Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua biasa disampaikan dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Jika mengacu pada sembilan jenis disfemisme dalam penyampaian ujaran kebencian, peneliti PR2Media menemukan bahwa ada tiga jenis disfemisme yang paling sering dinyatakan oleh peserta FGD di tiga provinsi, yaitu sinekdoke (menggambarkan sesuatu atau seseorang secara keseluruhan), julukan disfemistik (penggunaan nama binatang), dan disfemisme “-ist” (menyasar etnik atau suku tertentu).

Secara umum, para peserta FGD menyatakan keprihatinan akan beragam ujaran kebencian yang mereka temui di media sosial, baik ujaran kebencian berbasis etnik dan agama maupun ujaran kebencian yang menyasar gender dan profesi tertentu. Mereka berharap, penyelenggara media sosial bisa lebih baik dalam upaya mendeteksi kemunculan ungkapan-ungkapan tersebut, terutama yang disampaikan dalam ekspresi lokal atau daerah dan kombinasi bahasa Indonesia dengan daerah.

Hal lain yang bisa digarisbawahi dari riset ini adalah bahwa ketegangan laten atau potensi permusuhan antar etnik dan agama di tiga provinsi tersebut biasanya terkait dengan isu sosial ekonomi politik, seperti pemerataan sumber daya ekonomi, aspirasi politik, dan status sosial antara orang asli dan pendatang, yang kebetulan juga mengikuti garis etnik dan agama tertentu.

Kami menilai, kata, frasa, maupun kalimat dalam bahasa lokal yang telah didaftar peneliti untuk tiap provinsi bisa berfungsi sebagai data bagi platform media sosial dan pemerintah untuk melakukan moderasi atau pengaturan konten yang lebih baik

sesuai kebutuhan masyarakat di provinsi tersebut. Temuan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai data oleh peneliti lain untuk riset selanjutnya, sehingga semakin memperkaya *body of knowledge* tentang ujaran kebencian di media sosial yang disampaikan dalam bahasa lokal di Indonesia.



# REFERENSI

- Afnan, D. (2022). Mitos larangan menikah antara orang Jawa dengan orang Sunda dalam perspektif masyarakat modern. *Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal*, 2(1), 157–176. <https://doi.org/10.21009/Arif.021.10>
- Alhamid, I., & Suryo, D. (2014). *Jayapura dalam transformasi agama dan budaya: Memahami akar konflik Kristen-Islam di Papua*. Universitas Gadjah Mada.
- Ayu, D. I. (2021, December 20). Indeks kerukunan umat beragama tahun 2021 masuk kategori baik. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://www.kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik-latuic>
- Bako, E. N., Setia, E., & Deliana. (2019). Budaya populer dan komunikasi: Bentuk disfemia para netizen pada akun Instagram lambe\_turah. *Bahasa Indonesia Prima*, 1(2), 56–61. <https://doi.org/10.34012/bip.v1i2.601>
- Basuki, I. S. (2020, August 21). Mengapa sentimen negatif terhadap etnis Cina mengakar kuat di Indonesia. *The Conversation*. <https://theconversation.com/mengapa-sentimen-negatif-terhadap-etnis-cina-mengakar-kuat-di-indonesia-144673>
- Boateng, W. (2012). Evaluating the efficacy of Focus Group Discussion (FGD) in qualitative social research. *International Journal of Business and Social Science*, 3(7), 54–57. <https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2154/2015/09/Evaluating-the-Efficacy-of-Focus-Group-Discussion-in-Qualitative-Social-Research.pdf>
- Darmawan, I. N., & Muhaimi, L. (2019). Dysphemism lexical items of hate speeches: Towards education of students for political correctness [Paper Presentation]. In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research volume 465*. Proceedings of the 1st Annual Conference on

- Education and Social Sciences. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200827.061>
- Ekaptiningrum, E. (2022, July 8). Menakar pemekaran wilayah sebagai resolusi konflik. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/22682-menakar-pemekaran-wilayah-sebagai-resolusi-konflik/>
- Facebook. (n.d.). Hate speech. *Facebook*. <https://transparency.fb.com/en-gb/policies/community-standards/hate-speech/>
- Firdaus, M. A. (2014). Melacak peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jayapura. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(1), 1–34. <https://doi.org/10.24252/jdi.v2i1.6507>
- Gagliardone, I., Gal, D., Alves, T., & Martinez, G. (2015). *Countering online hate speech*. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).
- Hardi, A. T. (2018, January 3). Jaringan Gusdurian peringatkan soal ujaran kebencian di tahun politik. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/139045/jaringan-gusdurian-peringatkan-soal-ujaran-kebencian-di-tahun-politik>
- Hawdon, J., Oksanen, A., & Räsänen, P. (2017). Exposure to online hate in four nations: A cross-national consideration. *Deviant Behavior*, 38(3), 254–266. <https://doi.org/10.1080/01639625.2016.1196985>
- Joumilena, E. (2022, June 17). Sesuai dengan 7 wilayah adat, Mendagri dan Gubernur Papua sepakati pemekaran tujuh provinsi. *Portalpapua.com*. <https://portalpapua.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1304764747/sesuai-dengan-7-wilayah-adat-mendagri-dan-gubernur-papua-sepakati-pemekaran-tujuh-provinsi>
- Jumaidi, S., & Indriawati, T. (2023, March 16). Berapa suku yang ada di Papua?. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/>

- stori/read/2023/03/16/140000579/berapa-suku-yang-ada-di-papua-?page=all
- Kementerian Agama. (2022). Indeks kerukunan umat beragama 2022. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://www.kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-tahun-2021-masuk-kategori-baik-latuic>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022, August 31). Presiden Joko Widodo: Pemekaran wilayah di Papua untuk pemerataan pembangunan. *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44029/presiden-joko-widodo-pemekaran-wilayah-di-papua-untuk-pemerataan-pembangunan/0/berita>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018, July 24). Badan bahasa petakan 652 bahasa daerah di Indonesia. *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/badan-bahasa-petakan-652-bahasa-daerah-di-indonesia>
- Kemp, S. (2023, February 9). Digital 2023: Indonesia. *Datareportal*. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- Kurnia, N., Wendratama, E., Rahayu, R., Adiputra, W. M., Syafrizal, S., Monggilo, Z. M. Z., Utomo, W. P., Indarto, E., Aprilia, M. P., & Sari, Y. A. (2020). WhatsApp group and digital literacy among Indonesian women. *WhatsApp, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, PR2Media and Jogja Medianet*.
- Mujani, S., & Kuipers, N. (2020). Who Believed Misinformation during the 2019 Indonesian Election? *Asian Survey*, 60(6), 1029-1043. doi:10.1525/as.2020.60.6.1029
- Piazza, J. A. (2020). Politician hate speech and domestic terrorism. *International Interactions*, 46(3), 431–453. <https://doi.org/10.1080/03050629.2020.1739033>



- Reichelmann, A., Hawdon, J., Costello, M., Ryan, J., Blaya, C., Llorent, V., Oksanen, A., Räsänen, P., & Zych, I. (2021). Hate knows no boundaries: Online hate in six nations. *Deviant Behavior*, 42(9), 1100–1111. <https://doi.org/10.1080/01639625.2020.1722337>
- Sabara. (2023). Peran NU sebagai agen perdamaian di Papua. *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 9(1), 89–106. <https://blamakassar.ejournal.id/mimikri/article/view/1028/487>
- Saugi, W., Zurqoni., Syarifaturrahmatullah., Abdillah, M. H., Susmiyati, S., & Sutoko, I. (2022). Cinta dan kehangatan: Studi kualitatif pembentukan nilai toleransi anak usia dini di Papua. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 5630–5640. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2787>
- Schäfer, S., Rebasso, I., Boyer, M. M., Planitzer, A. M. (2023). Can we counteract hate? effects of online hate speech and counter speech on the perception of social groups. *Communication Research*, 1–27. <https://doi.org/10.1177/00936502231201091>
- Sazali, H., Rahim, U. A., Marta, R., & Gatcho, A. R. (2022). Mapping hate speech about religion and state on social media in Indonesia. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 189–208. <https://doi.org/10.15575/cjik.v6i2.20431>
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua*. Friedrich Ebert Stiftung (FES)
- Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)
- YouTube. (n.d.). Hate speech policy. *YouTube*. <https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=en>
- United Nations. (n.d.). Understanding hate speech. *United Nations*. <https://www.un.org/en/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech>

- Wendratama, E., Masduki., Rahayu., Suci, P. L., Rianto, P., Aprilia, M. P., Paramastri, M. A., & Adiputra, W. M. (2023). *Pengaturan konten ilegal dan berbahaya di media sosial: Riset pengalaman pengguna dan rekomendasi kebijakan*. Pemantau Regulasi dan Regulator Media. <https://pr2media.or.id/publikasi/pengaturan-konten-ilegal-dan-berbahaya-di-media-sosial-riset-pengalaman-pengguna-dan-rekomendasi-kebijakan/>
- Wendratama, E., Yusuf, I. A. (2023). COVID-19 Falsehoods on WhatsApp: Challenges and Opportunities in Indonesia. In *Mobile Communication and Online Falsehoods in Asia: Trends, Impact and Practice*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-024-2225-2>

# LAMPIRAN

## Peserta FGD di Bandung, Jawa Barat

No	Nama	Institusi/Profesi
1	Ananda Bintang	Universitas Padjajaran
2	Fanny S. Alam	Sekolah Damai Indonesia (SEKODI)
3	Alya Sabila	Universitas Islam Bandung
4	Fam Kim Fat (Akiun)	Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Bandung
5	Catur Ratna W.	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung
6	Risdo Maulitua S.	Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB)
7	Gilang Gimnashar	Samahita Bandung
8	Prima Arti	Universitas Islam Bandung
9	Hadi Purnama	Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi)
10	Citra Pratiwi	Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)
11	Alfianto Yustinova	Jabar Saber Hoaks

## Peserta FGD di Palangkaraya, Kalimantan Tengah

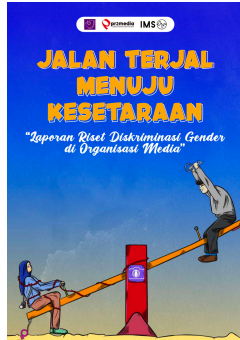
No	Nama	Institusi/Profesi
1	Daan Rismon	Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kalimantan Tengah
2	Sepmiwawalma	Penyusun Kamus Bahasa Dayak Ngaju
3	Jonie Prihanto	Kantamedia.com
4	Ervantia Restulita L. Sigai	Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangkaraya
5	Parada L. Kdr	Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah
6	Sulandra L. Kdr	Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangkaraya
7	Winawati	Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangkaraya
8	Aquarini	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

No	Nama	Institusi/Profesi
9	Annisa Rizki Ananda	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
10	Sri Astuty	Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
11	Jhon Retei Alfrisandi	Universitas Palangkaraya
12	Rumbaka Fachrizal E.	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

### Peserta FGD di Jayapura, Papua

No	Nama	Institusi/Profesi
1	Andreas Wakei	Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua
2	Imanuel Kwano	Rohaniawan, Kementerian Agama Kabupaten Deiyai, Papua Tengah
3	Hamim Mustafa	Dosen Universitas Muhammadiyah Papua
4	Santi Tuu	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Universitas Cenderawasih
5	Roberth Yewen	Jurnalis Kompas.com
6	Andre Kirwel	Jurnalis CNN Indonesia
7	Dian Wasaraka	Pegiat sosial
8	Nahria	Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua
9	Sarono	Pembimas Buddha, Kementerian Agama
10	Mariana Buiney	Dosen Universitas Cenderawasih
11	Karenapukh Marini	Mahasiswa
12	Toni Wanggai	Anggota Majelis Rakyat Papua/Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Papua

# Publikasi dari PR2Media



Publikasi ini bisa diunduh di laman <https://pr2media.or.id/publikasi-list/>